

Judul : DPR: anggaran perekrutan 24.000 tamtama sudah masuk perhitungan pemerintah
Tanggal : Senin, 16 Juni 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

TNI AD

DPR: Anggaran Perekrutan 24.000 Tamtama Sudah Masuk Perhitungan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS — Rencana TNI Angkatan Darat merekrut sebanyak 24.000 prajurit tamtama tahun ini diyakini telah melalui perencanaan matang, termasuk alokasi anggarannya. Segala aspek terkait perekrutan tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksmono, juga telah sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah.

"Semua hal, aspek, dalam kebijakan tersebut telah disiapkan oleh pemerintah, dari awal hingga akhir. Saya yakin dampak kebijakan ini akan bermanfaat sangat besar kepada kemandirian bangsa," tutur Dave, Minggu (15/6/2025).

Perekrutan itu disebut sejalan dengan Doktrin Pertahanan Negara Tahun 2023, yakni membangun sistem pertahanan

yang mandiri dan berbasis kewilayahan.

Sebagai implementasi konkret, akan dibentuk Batalyon Teritorial Pembangunan di seluruh Indonesia. Setiap batalyon akan berdiri di lahan seluas 30 hektar dan akan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Setiap batalyon itu akan dilengkapi sedikitnya empat kompi, yaitu kompi pertanian, peternakan, medis, dan zeni.

Dave menegaskan, soal kebutuhan anggaran untuk perekrutan 24.000 tamtama itu sudah masuk dalam perhitungan pemerintah. Ia pun menyebut kebijakan efisiensi anggaran tetap berjalan.

Seperti diberitakan Kompas.com, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian

Pertahanan Brigadir Jenderal Frega Ferdinand Wenas juga menyebutkan bahwa langkah TNI AD yang akan merekrut 24.000 tamtama sudah dihitung secara cermat.

Meski demikian, Frega tidak mengetahui pasti jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam merekrut prajurit baru itu. Namun, ia memastikan segala aspeknya sudah dikalkulasi. "Saya kurang tahu nominalnya, tetapi pastinya sudah dalam kalkulasi dan tentunya juga untuk mendukung kedaulatan negara," tutur Frega.

Berpotensi pemborosan

Menanggapi keinginan pemerintah untuk tetap melanjutkan perekrutan 24.000 tamtama itu, peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadris, men-

Ketika dikalikan untuk 24.000 personel, total beban anggaran dapat mencapai triliunan rupiah setiap tahun.

Beni Sukadris

an Pertahanan Brigadir Jenderal Frega Ferdinand Wenas juga menyebutkan bahwa langkah TNI AD yang akan merekrut 24.000 tamtama sudah dihitung secara cermat.

Meski demikian, Frega tidak mengetahui pasti jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam merekrut prajurit baru itu. Namun, ia memastikan segala aspeknya sudah dikalkulasi. "Saya kurang tahu nominalnya, tetapi pastinya sudah dalam kalkulasi dan tentunya juga untuk mendukung kedaulatan negara," tutur Frega.

Beni menilai kebijakan merekrut 24.000 tamtama yang tujuannya antara lain untuk membantu sektor pertanian dan peternakan itu menunjukkan kekeliruan prioritas dalam konteks pertahanan nasional. Beni menilai perekrutan itu juga berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara dalam

skala besar.

Menurut Beni, pembangunan satu batalyon saja sudah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jika melibatkan puluhan ribu personel baru, beban anggaran yang harus ditanggung negara akan membengkak signifikan, yakni meliputi biaya perekrutan, pelatihan, pengadaan peralatan, gaji, logistik, dan tunjangan jangka panjang.

"Ketika dikalikan untuk 24.000 personel, total beban anggaran dapat mencapai triliunan rupiah setiap tahun," katanya.

Apalagi, lanjut Beni, kebijakan ini muncul di tengah kondisi anggaran pertahanan Indonesia yang sedang menghadapi tekanan. Target kekuatan pokok minimum atau *minimum essential force* (MEF) yang berakhir pada 2024 masih perlu ditun-

taskan.

Indonesia kini juga didesak untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sangat krusial bagi kemampuan tempur TNI.

Alih-alih mengalokasikan anggaran dan personel untuk kegiatan pertanian, Beni menekankan bahwa kebutuhan yang lebih relevan dan mendesak saat ini adalah memperkuat satuan tempur, seperti infanteri dan zeni. Ia menyoroti pentingnya kehadiran mereka di wilayah perbatasan, daerah rawan konflik, dan kawasan strategis seperti Papua dan Laut Natuna Utara, yang terus menghadapi peningkatan ketegangan geopolitik serta potensi pelanggaran kedaulatan.

"Tantangan pertahanan saat ini tidak hanya bersifat konvensional, tetapi juga melibatkan

ancaman nontradisional, seperti perang siber, penyusupan intelijen asing, serta konflik asimetris yang membutuhkan kesiapsiagaan unit khusus dan sistem deteksi dini yang modern," kata Beni.

Penggunaan tamtama aktif untuk kegiatan pertanian dan peternakan juga dianggap menciptakan persoalan serius terkait tugas pokok dan fungsi militer. Beni menegaskan, tugas pokok TNI adalah di bidang pertahanan dan melindungi kedaulatan negara, bukan menjalankan peran-peran sipil yang semestinya ditangani oleh Kementerian teknis.

"Pendekatan ini tidak hanya berisiko menimbulkan tunggang-tindih birokrasi, tetapi juga mengancam profesionalisme militer yang telah dibangun pascareformasi," ujarnya. (WIL)